BAB III

PEMBAHASAN MASALAH

3.1 Sekilas Tentang Perstatistikan

Perstatistikan di indonsesia tersusun berdasarkan pada undang-undang statistik No.7 yang dibuat pada tahun 1960 dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik. Berdasarkan Undang-undang tersebut Biro Pusat Statistik mengemban tugas :

a. Bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan statistik yang di tugaskan oleh Pemerintah antara lain dibidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, perburuhan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan dan agama.

b. Atas nama pemerintah, melaksanakan koordinasi kegiatan statistik dari segenap Instansi Pemerintah, ditingkat pusat dan daerah, dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan-pekerjaan yang sama oleh dua instansi, dan untuk menciptakan keseragaman dalan menggunakan definisi, klasifikasi, ukuran-ukuran dan sebagainya.

c. Mengadakan daya upaya agar masyarakat menyadari tujuan dan kegunaan statistik guna memudahkan penyelidikan statistik.

Disamping Biro Pusat Statistik, Instansi-instansi pemerintah lainnya juga mengumpulkan data untuk keperluan mereka, terutama berdasarkan laporan-laporan hasil administrasi. Jika instansi-instansi tersebut dalam hal tertentu mengumpulkan data langsung dari lapangan, maka Undang-Undang statistik secara khusus mengatur mengenai mekanisme koordinasinya. Tujuannya untuk

menghindari terlalu banyaknya beban responden atau sumber data, dan untuk mengurangi pemborosan dari pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan bersifat duplikasi.

Dalam hal ini Undang-Undang Statistik mangatur hal-hal sebagai berikut :

a. Untuk kepentingan koordinasi kegiatan statistik, setiap Instansi Pemerintah yang bermaksud melaksanakan kegiatan Statistik harus meminta pendapat Kepala Biro Pusat Statistik terlebih dahulu mengenai rencana survei, daftar isian, konsep dan definisi yang akan dipakai, jenis Statistik yang akan dikumpulkan dan besarnya biaya yang di rencanakan

b. Kegiatan Statistik yang menurut pendapat Kepala Biro Pusat Statistik memerlukan biaya yang besar atau cakupan yang luas perlu mendapat persetujuan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

c. Instansi-instansi pemerintah yang melaskanakan Kegiatan Statistik tertentu, di wajibkan menyampaikan data statistik yang dihasilkan kepala Biro Pusat Statistik, kecuali statistik yang di kumpulkan semata-mata untuk keperluan intern instansi yang bersangutan.

- **Ketentuan Lain Dalam Peraturan Tentang Statistik**

Untuk memperlancar kegiatan statistik dan menghindari kecurigaan diantara responden, Undang-Undang statistik juga mengatur berbagai ketentuan termasuk kewajiban untuk memberikan data, kerahasiaan data individu, pelanggaran dan hukuman.

3.2 Struktur Organisasi

Biro Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah suatu lembaga pemerintah Non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini menjamin BPS untuk tidak tergantung pada instansi pemerintah lainnya dalam menghasilkan data statistik.

Struktur organisasi BPS berlandaskan pada peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 dan keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992. BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala dan empat orang deputi. Kepala BPS bertanggung jawab atas kebijaksanaan pokok organisasi dan manajemen BPS. Wakil kepala BPS bertanggung jawab atas kelancaran manajemen di dalam BPS.

Selain itu tugas-tugas dari deputi-deputi adalah sebagai berikut :

a. Deputi Administrasi bertanggung jawab atas koordinasi pengelolaan keuangan , kepegawaian dan organisasi, perlengkapan dan perbekalan, pengendalian serta memberikan pelayanan administrasi. Deputi ini membawahi empat biro, yaitu Biro Umum, Biro perlengkapan dan perbekalan, Biro kepegawaian, dan Biro pengendalian.

b. Deputi Perencanaan dan Analisis statistik bertanggung jawab atas pembinaan kegiatan perencanaan program dan Metodologi statistik, Sistim Informasi statistik, pengolahan hasil sensus, survei dan data sekunder serta menyelenggarakan analisis statistik. Deputi ini membawahi empat Biro, yaitu Biro perencanaan program dan

metodologi, Biro sistem informasi statistik, Biro pengolahan data serta Biro analisis dan pengembangan.

c. Deputi Statistik Produksi dan Kependudukan bertanggung jawab atas pembinaan kegiatan statitik pertanian, industri, konstruksi, pertambangan dan energi, kesejahteraan rakyat, serta statistik demografi dan ketenagakerjaan. Deputi ini membawahi empat Biro, yaitu Biro statistik pertanian, Biro statistik industri, Biro statistik kesejahteraan rakyat serta Biro statistik demografi dan ketenagakerjaan.

d. Deputi Statistik Distribusi dan Neraca Nasional bertanggung jawab atas pembinaan kegiatan statistik harga dan keuangan, perdagangan dan jasa serta neraca nasional. Deputi ini membawahi empat Biro yaitu, Biro statistik harga dan keuangan, Biro statistik perdagangan dan jasa, Biro neraca produksi serta Biro neraca konsumsi dan akumulasi.

Didaerah-daerah terdapat 27 kantor perwakilan Biro Pusat Statistik tingkat propinsi yang di bawahnya terdapat 304 kantor cabang perwakilan Biro Pusat Statistik tingkat kabupaten atau kotamadya. Kantor statistik tingkat propinsi dibagi dalam dua katagori yaitu type A dan B.

Tipe kantor statistik propinsi tersebut di dasarkan atas beban kerja serta pertimbangan lain yang dinilai mempunyai keterkaitan langsung dengan tugas dan pungsi kantor statistik propinsi.

Kantor statistik type A berlokasi di enam propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, sedangkan kantor statistik di propinsi-propinsi lainnya bertyipe B.

Kantor statistik propinsi type A membawahi enam Bidang, yaitu Bagian tata usaha , Bidang statistik produksi, Bidang statistik distribusi, Bidang statistik kependudukan, Bidang pengolahan data serta bidang neraca wilayah dan analisis.

Kantor statistik tipe B mempunyai empat Bidang yang sama dengan kantor statistik type A kecuali bidang pengolahan data serta bidang neraca wilayah dan analisis, dimana untuk kantor statistik propinsi type B digabung menjadi satu, yaitu bidang pengolahan, neraca wilayah dan analisis.

Mantri Statistik adalah aparat biro pusat statistik di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab pada kepala kantor statistik tingkat dua . Mereka adalah petugas pengumpul data statistik yang secara langsung berhubungan dengan responden.

3.3 Pembahasan Masalah

Mengacu kepada data yang telah kami peroleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat dan memang data-data itu sangat berguna bagi kami untuk penyusunan naskah tugas akhir ini, data-data yang kami ambil untuk bahan penyusunan tugas akhir itu menyangkut atara lain data-data jumlah penduduk Jawa Barat (laki-laki dan perempuan) hasil Sensus Penduduk 1990, jumlah penduduk Jawa Barat (laki-laki dan perempuan) hasil Survei Penduduk Antara Sensus 1995 dan jumlah penduduk Jawa Barat (laki-laki dan perempuan) berdasarkan pengelompokan usia penduduk Jawa Barat.

Yang mana perlu diketahui bahwa pada Sensus Penduduk 90 diadakan dua tahap pencacahan yaitu :

1. Pencacahan lengkap terhadap semua penduduk adapun tujuan pokok dari pencacahan lengkap itu untuk memperoleh data lengkap tentang jumlah yang di rinci menurut jenis kelamin dan wilayah administratif, dan pengolahan data hasil pencacahan lengkap dapat di selesaikan dalam jangka waktu relatif singkat (yaitu 2 bulan).
2. Pencacahan Sampel yang mencakup lebih kurang 5 persen rumah tangga, adapun tujuan dari pencacahan sampel itu untuk mengumpulkan keterangan penduduk seperti: kewarganegeraan, agama, bahasa, pendidikan, tenaga kerja, kelahiran dan lain-lain dan pengolahan data hasil pencacahan sampel akan memakan waktu kurang lebih 2 tahun dan hasilnya diumumkan secara bertahap.

Sedangkan SUPAS95 yang diadakan antara Sensus Penduduk 1990 dan Sensus Penduduk 2000, yang mana SUPAS95 ini dirancang khusus untuk mendapatkan data statistik kependudukan yang nantinya dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 1990. Data yang dikumpulkan pada SUPAS95 meliputi bidang-bidang: Demografi, Ketenaga-kerjaan dan Sosial Budaya.

Kriteria dari masing-masing bidang itu adalah:

a) Pada bidang Demografi dihimpun data yang terinci mengenai migrasi , fertilitas dan moralitas termasuk riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita yang pernah kawin .
b) Bidang ketenaga-kerjaan meliputi angkatan kerja, jam kerja, lapangan kerja, jenis dan status pekerjaan.

c) Sosial Budaya yang mencakup partisipasi sekolah, tingkat pendidikan, bahasa dan kondisi tempat tinggal .

3.3.1 Data Penduduk Hasil Sensus 1990

Dari hasil pencacahan Sensus Penduduk 1990 yang terbagi menjadi 20 wilayah kabupaten dan 4 kotamadya jumlah penduduk Jawa Barat pada tanggal 31 Oktober tahun 1990 adalah 35.381.153 , dengan perincian untuk wilayah Pandeglang terdapat 858.476 jiwa, Lebak 873.670 jiwa, bogor 3.736.207 jiwa, Sukabumi 1.848.282 jiwa, Cianjur 1.662.089 jiwa, Bandung 3.201357 jiwa, Garut 1.748.634 jiwa, Tasikmalaya 1.814.935 jiwa, Ciamis 1.478.476 jiwa, Kuningan 892.294 jiwa, Cirebon 1.649.483 jiwa, Majalengka 1.032.032 jiwa, Sumedang 831.835 jiwa, Indramayu 1.446.978 jiwa, Subang 1.206.715 jiwa, Purwakarta 563.102 jiwa, Karawang 1.491.634 jiwa, Bekasi 2.104.459 jiwa, Tanggerang 2.765.189 jiwa dan Serang 1.471.294 jiwa, sedangkan untuk wilayah kotamadyanya terdapat empat wilayah yang antara lain Bogor 271.711 jiwa, Sukabumi 119981 jiwa, Bandung 2.057.442 jiwa serta Cirebon sebanyak 254.878 jiwa, jumlah ini sudah termasuk penduduk yang bertempat tinggal tetap (tuna wisma, awak kapal, penghuni kapal / rumah apung dan masyarakat terpencil). Dari jumlah itu sebanyak 17 .736.290 adalah laki-laki dan 17.644.863 adalah perempuan.

3.3.2 Data Penduduk Hasil SUPAS 1995

Sedangkan hasil SUPAS95 jumlah penduduk Jawa Barat yang terbagi dalam 20 kabupaten dan 5 kotamadya yang antara lain untuk masing-masing wilayah terdapat di Pandeglang 921.798 jiwa, Lebak 954.088

jiwa, Bogor 4.415.195 jiwa, Sukabumi 1.970.170 jiwa, Cianjur 1.757430 jiwa, Bandung 3.383.233 jiwa, Garut 1.832.213 jiwa, Tasikmalaya 1.869.619 jiwa, Ciamis 1.536.347 jiwa, Kuningan 917.530 jiwa, Cirebon 1.772.953 jiwa, Majalengka 1.067.948 jiwa, Sumedang 860.101 jiwa, Indramayu 1.513.209 jiwa, Subang 1.239.295 jiwa, Purwakarta 602.711 jiwa, Karawang 1.582.991 jiwa, Bekasi 2.757.376 jiwa, Tanggerang 2.401.216 jiwa dan kabupaten Serang 1.634.688 jiwa dan untuk wilayah kotamadyanya antara lain Bogor 285.114 jiwa, Sukabumi 125.766 jiwa, Bandung 2.356.120 jiwa, Cirebon 261.574 serta Tanggerang 1.188.102 jiwa dan seluruhnya berjumlah 39.206.787 jiwa dan sudah termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap.

Pertumbuhan penduduk di Jawa Barat terutama disebabkan karena sumbangan pertumbuhan yang tinggi di tiga kabupaten yang terletak di sekitar wilayah DKI Jakarta. Dan juga pada SUPAS95 terdapat daerah di wilayah Jawa Barat ini yang mengalami perluasan wilayah administratif yaitu kabupaten Tanggerang yang mana pada Sesus Penduduk 1990 belum tercantum atau memiliki wilayah kotamadya.

Untuk lebih lengkapnya disini kami cantumkan tabel Penduduk hasil Sensus Penduduk 1990 yang tercantum dalam tabel 3.3.1 dan hasil SUPAS95 yang tercantum dalam tabel 3.3.2 .

3.4 Penduduk Berdasarkan Usia

Pengelompokan usia dimaksudkan agar pembaca lebih mudah dalam memahami serta mudah untuk dimengerti, disini penulis memutuskan untuk

TABEL 3.3.1 JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK JAWA BARAT MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 1990

KODE	KABUPATEN /KOTAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PANDEGLANG	433968	424508	858476
2	LEBAK	443434	430236	873670
3	BOGOR	1897200	1839007	3736207
4	SUKABUMI	932749	915533	1848282
5	CIANJUR	836880	825209	1662089
6	BANDUNG	1600300	1601057	3201357
7	GARUT	868654	879980	1748634
8	TASIKMALYA	897137	917798	1814935
9	CIAMIS	726601	751875	1478476
10	KUNINGAN	445978	446316	892294
11	CIREBON	819512	829971	1649483
12	MAJALENGKA	509230	522802	1032032
13	SUMEDANG	413369	418466	831835
14	INDRAMAYU	718612	728366	1446978
15	SUBANG	598457	608258	1206715
16	PURWAKARTA	284694	278408	563102
17	KARAWANG	747840	743794	1491634
18	BEKASI	1056936	1047523	2104459
19	TANGGERANG	1401489	1363700	2765189
20	SERANG	745567	725727	1471294
71	BOGOR	136863	134848	271711
72	SUKABUMI	59564	60417	119981
73	BANDUNG	1035910	1021532	2057442
74	CIREBON	125346	129532	254878
	JUMLAH	**17736290**	**17644863**	**35381153**

Sumber*: ***"Penduduk Jawa Barat Hasil SP90", Halaman: 503, Tabel : 5.3.

TABEL 3.3.2 JUMLAH PENDUDUK JAWA BARAT MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 1995

KODE	KABUPATEN/KOTAMADYA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PANDEGLANG	465678	456120	921798
2	LEBAK	485835	468253	954088
3	BOGOR	2206597	2208598	4415195
4	SUKABUMI	1003987	966183	1970170
5	CIANJUR	872811	884619	1757430
6	BANDUNG	1693230	1690003	3383233
7	GARUT	917477	914736	1832213
8	TASIKMALAYA	929353	940266	1869619
9	CIAMIS	764264	772083	1536347
10	KUNINGAN	466992	450538	917530
11	CIREBON	912106	860847	1772953
12	MAJALENGKA	518604	549344	1067948
13	SUMEDANG	426198	433903	860101
14	INDRAMAYU	747022	766187	1513209
15	SUBANG	613366	625929	1239295
16	PURWAKARTA	306750	295961	602711
17	KARAWANG	800894	782097	1582991
18	BEKASI	1405534	1351842	2757376
19	TANGGERANG	1195184	1206032	2401216
20	SERANG	855819	778869	1634688
71	BOGOR	146832	138282	285114
72	SUKABUMI	59415	66351	125766
73	BANDUNG	1165640	1190480	2356120
74	CIREBON	129168	132406	261574
75	TANGGERANG	595068	593034	1188102
	JUMLAH	19683824	19522963	39206787

Sumber*: ***"Penduduk Jawa Barat Hasil SUPAS95", Halaman: 04, Tabel: 03.

mengelompokkan data penduduk menjadi tiga kelompok usia untuk semua penduduk diseluruh Jawa Barat, yaitu:

- Usia 0 sampai 29 tahun dikelompokkan menjadi kelompok masa pertumbuhan.
- Usia 30 sampai 54 tahun dikelompokkan kedalam kelompok masa produksi.
- Dan terakhir usia 55 sampai 75 lebih dikelompokan kedalam kelompok masa konsumsi.

3.4.1 Kelompok Usia Berdasarkan Hasil SP90

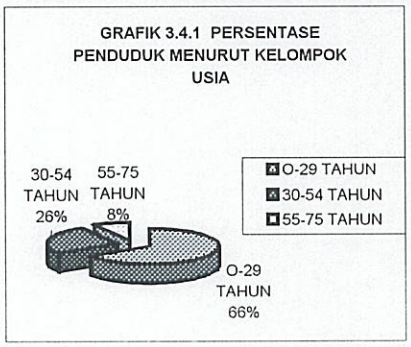
Jumlah penduduk pada tahun 1990 bila dilihat secara keseluruhan adalah 35.381153 jiwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dan bila jumlah tersebut diuraikan secara kelompok maka didapat jumlah :

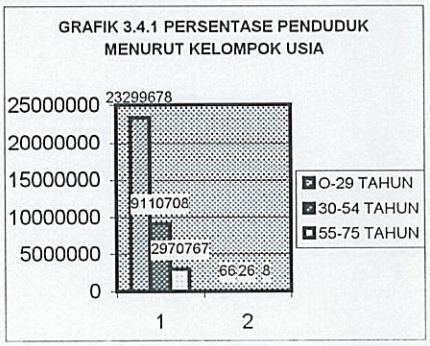
- Untuk usia 0 sampai 29 tahun berjumlah 23.299.678 jiwa.
- Untuk usia 30 sampai dengan 54 tahun berjumlah 9.110.708 jiwa dan
- Untuk usia 55 sampai 75 tahun sekitar 2.970.767 jiwa.

Tabel pengelompokkan usia dapat dilihat di tabel 3.4.1.

TABEL 3.4.1 PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK USIA

USIA	JUMLAH	PERSENTASE(%)
O-29 TAHUN	23299678	66
30-54 TAHUN	9110708	26
55-75 TAHUN	2970767	8
JUMLAH	35381153	100





****Sumber** : ***"Penduduk Jawa Barat Hasil SP90"***, Halaman:03, Tabel: 02.

3.4.2 Kelompok Usia Berdasarkan Hasil SUPAS95

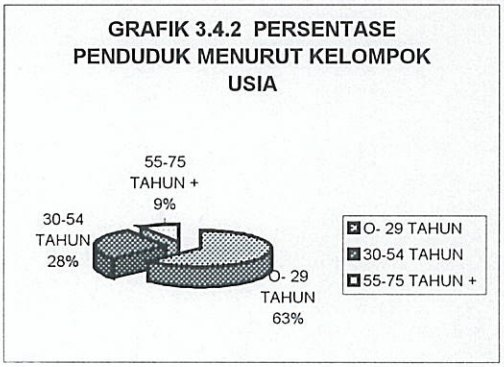
Sama seperti halnya pengelompokkan data penduduk di atas, bila di lihat secara keseluruhan data penduduk Jawa Barat itu adalah ;

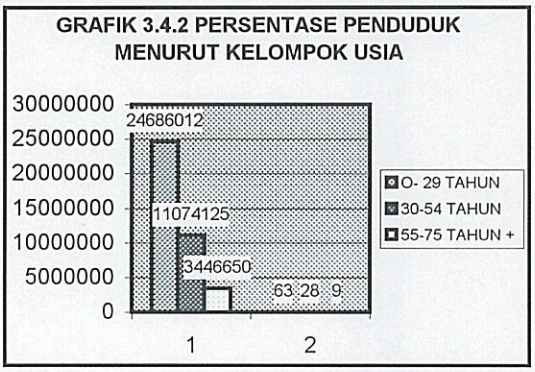
- Untuk usia 0 sampai 29 tahun berkisar 24.686.012 jiwa.
- Untuk usia 30 sampai 54 jiwa berkisar 11.074.125 jiwa dan
- Untuk usia 55 sampai 75 tahun lebih berjumlah sekitar 3.446.650 jiwa.

Tabelnya dapat dilihat pada tabel 3.4.2.

ABEL 3.4.2 PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK USIA

USIA	JUMLAH	PERSENTASE(%)
O- 29 TAHUN	24686012	63
30-54 TAHUN	11074125	28
55-75 TAHUN +	3446650	9
JUMLAH	39206787	100





****Sumber : *"Penduduk Jawa Barat Hasil SUPAS95"*,** Hal:22, Tabel: 02.

3.5 Analisa data

Beradsarkan akhir dari penghitungan jumlah data penduduk Jawa Barat tahun1990 serta 1995 diperkirakan terjadi pertambahan penduduk 3.825.634 jiwa (atau rata-rata 765125,8 jiwa pertahun).

Sedangkan laju angka penduduk dari 1990 berdasarkan pengelompokkan usia adalah :

- Usia 0-29 tahun terjadi pertambahan penduduk sekitar 1386334 jiwa (atau rata-rata 277.266,8 jiwa dengan persentase menurun sekitar 3%).
- Usia 30-54 tahun terjadi pertambahan penduduk1.963.417 jiwa (atau sekitar 392.683,4 jiwa pertahun dengan persentase kenaikan 2%).
- Usia 55-75 tahun lebih terjadi pertambahan penduduk sekitar 475883 jiwa (rata-rata95176,6 jiwa pertahun dengan kenaikan persentase 1%).

- **Catatan untuk SUPAS95 BPS tidak menyajikan data secara mendetil sampai kepada persentase serta laju pertumbuhan penduduk.**